

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan sebelumnya dan data-data yang telah diperoleh dari hasil riset, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun sebelum dan selama Covid-19 (2017-2022) yang paling besar terjadi pada tahun selama Covid-19 yaitu tahun 2022 sebesar 22% dengan kriteria kontribusi sedang karena $>20\%$. Sedangkan kontribusi paling sedikit terjadi pada tahun selama Covid-19 juga yaitu pada tahun 2021 sebesar 8,44% dengan kriteria kontribusi sangat kurang karena $<10\%$.
2. Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun sebelum dan selama Covid-19 (2017-2022) yang paling besar terjadi pada tahun selama Covid-19 yaitu tahun 2022 sebesar 15% dengan kriteria kontribusi kurang karena $>20\%$. Sedangkan kontribusi paling sedikit terjadi pada tahun sebelum Covid-19 juga yaitu pada tahun 2017 sebesar 6% dengan kriteria kontribusi sangat kurang karena $<10\%$.
3. Pertumbuhan pajak hotel dari tahun 2017-2022 mengalami peningkatan terjadi pada tahun selama Covid-19 yaitu tahun 2022 sebesar 1,48%, sedangkan yang mengalami penurunan terjadi pada tahun selama Covid-19 yaitu tahun 2020 sebesar -0,64%.

4. Pertumbuhan pajak restoran dari tahun 2017-2022 mengalami peningkatan terjadi pada tahun selama Covid-19 yaitu tahun 2022 sebesar 1,04%, sedangkan yang mengalami penurunan terjadi pada tahun selama Covid-19 yaitu tahun 2020 sebesar -0,48%.
5. Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun 2017-2022 mengalami peningkatan terjadi pada tahun sebelum Covid-19 yaitu tahun 2019 sebesar 64%, sedangkan yang mengalami penurunan terjadi pada tahun selama Covid-19 yaitu pada tahun 2020 sebesar -42%.

6.2 Saran

Melalui kesimpulan ini pula penulis memberikan saran-saran yang kiranya menjadi bahan masukan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan kebijakan dengan Membuka kembali hotel dan restoran yang tidak beroperasi selama Covid-19 melalui pengawasan yang ketat dari pelaku usaha hotel maupaun restoran agar orang yang mau berkunjung tetap mengikuti protokol kesehatan.
2. Tingkat Penghunian Kamar Hotel bertambah seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, domestik, maupun lokal. Yang berimbas pada pendapatan hotel dan restoran. Dengan itu dinas pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Membuka kembali sektor wisata yang sempat ditutup karena wabah Covid-19.
3. Mengatasi wajib pajak tidak telapor di tahun sebelum dan selama Covid-19, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang diwakili Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Badan Pendapatan Daerah melakukan

pendataan ulang wajib pajak secara berkala tidak hanya dilihat dari wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), tetapi juga terjun langsung ke lapangan untuk melihat wajib pajak baru, sehingga data yang dimiliki itu benar dan jelas dan secara langsung melihat potensi di masing-masing sektor pajak.

4. Badan Pendapatan Daerah selaku SKPD yang menangani penerimaan daerah khususnya Pajak hotel dan restoran, harus mempunyai data historis agar dalam menentukan target disetiap jenis pajak memiliki dasar penetapan target. Sehingga dapat dilihat dan dihitung potensi pajak yang sebenarnya di Kabupaten Manggarai Barat.
5. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Satgas Korups pencegahan wilayah yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat lebih meningkatkan pengawasan dan penegakan serta pengetatan sanksi administratif terhadap wajib pajak hotel dan restran agar tercapai efek jera bagi pelanggarannya.
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebaiknya memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap wajib pajak atau pengusaha Restoran dan Hotel tentang pentingnya pembayaran pajak. Bagi wajib pajak hotel dan restoran seharusnya bersikap terbuka dalam melaporkan pendapatannya agar tidak terjadi salah persepsi mengenai pajak terutang.
7. Dalam rangka peningkatan penerimaan di masa Covid-19 khususnya pajak Restoran dan Pajak Hotel di Kabupaten Manggarai Barat perlu

melakukan perbaikan sistem dengan menggunakan *E-Tax (Electronic Tax)*. Sistem ini juga sebagai pendukung kegiatan secara *daring* di masa Covid-19. Selain itu, sistem ini dapat digunakan untuk meminimalisir kebocoran pajak serta dalam rangka mengawasi kepatuhan wajib pajak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ciktorita Rosniawati Inggur. (2022). *Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan Kota Jakarta Barat*. Jurnal Ekonomi Trisakti, 1993-2000.
- Hanafi, Mamduh M. dan Abdul Halim. (2007). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Undang-Undang:**
- JDIH BPK RI. (2017). *Database Peraturan "Pemerintah Daerah"*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id>: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- JDIH BPK RI. (2020). *Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id>: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020>
- JDIH BPK RI. (2010). *Pajak Daerah Provinsi NTT*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id>: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/59874/perda-prov-nusa-tenggara-timur-no-2-tahun-2010>
- JDIH BPK RI. (2009). *Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007*. Retrieved from peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38657/uu-no-23-tahun-2009>
- JDIH BPK RI. (2020). *Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id>: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135243/perpres-no-54-tahun-2020>
- JDIH BPK RI. (2004). *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id>: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- JDIH BPK RI. (2012). *Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat No.3 Tahun 2012 "Pajak Hotel"*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id>: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/30764/perda-kab-manggarai-barat-no-3-tahun-2012>
- JDIH BPK RI. (2012). *Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat No. 4 Tahun 2012 "Pajak Restoran"*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id>: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/30803/perda-kab-manggarai-barat-no-4-tahun-2012>
- Keuangan, K. (2020, September). *loka data*. Retrieved from [Beritagar.id.com: https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/target-dan-realisisi-pajak-2007-2021](https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/target-dan-realisisi-pajak-2007-2021)
- Kurniawan, P. d. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Bayumedia.
- Keuangan, D. J. (2021, Agustus 23). *Data Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan per Kabubaten/Kota Tahun 2010-2019*. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id>: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=20680>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM.

- Maria Ekawati. (2019). Analisis efektivitas dan implementasi pemungutan pajak hotel dan restoran di atas kapal terhadap penerimaan pajak Daerah . *Skripsi*, 6.
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Priyatna, T. (2020, Mei Selasa). *pontianakpost*. Retrieved from pontianakpost.com: <https://pontianakpost.jawapos.com/dampak-Covid-19-pada-sektor-perpajakan-di-indonesia/>
- Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie. (2017). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pratiwi, a. A. (2022). *Analisis perbedaan penerimaan pendapatan asli pajak hotel dan pajak restoran sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 di kota Yogyakarta*. *Jurnal economica*, 36-37.
- PAMUNGKAS, T. A. (2014). *Tata Cara Pemeriksaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur*. Retrieved from 123dok.com: <https://123dok.com/document/6qmpdwq8-pemeriksaan-pajak-kantor-pelayanan-pajak-pratama-medan-timur.html>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Solihin, B. d. (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA.
- Samputra, W. d. (2020). *Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap aspek ekonomi dan perpajakan*. Jakarta Pusat: *Jurnal ekonomi*
- Supardi. (2020, Mei Rabu). *www.Riau24.com*. Retrieved from riau24.com: <https://www.riau24.com/berita/baca/1589964856-dampak-Covid-19-berdampak-pada-penurunan-pajak-Daerah-penerimaan-pajak-Daerah-turun-hingga-50-persen>
- Wiguna, D. (2020, Desember Senin). *Antara Kantor Berita Indonesia*. Retrieved from antaranews.com: antaranews.com/berita/1906408/penerimaan-pajak-hingga-november-2020-turun-185-persen